

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DARI SEKTOR PERTANIAN DI DESA SONDONG LAYUK KECAMATAN MAMBI

Mustari Mula¹ Ikram²

^{1,2)}Prodi Administrasi Negara, STISIP Bina Generasi, Polewali Mandar -
Indonesia
Email Korespondensi: mustarimula@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor pertanian di Desa Sondong Layuk Kecamatan Mambi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif Kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati langsung objek yang di teliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Dari hasilpenelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Sondong Layuk dalam hal ini tidak memiliki strategi untuk meengsejahterakan Masyarakat Dari Sektor Pertanian Di Desa Sondong Layuk, pemerintah hanya membiarkan kelompok-kelompok tani berjalan sendiri tanpa adanya pendampingan, perlindungan, serta kekuatan untuk kelompok tani maju berkembang dalam teknologi pertanian sehingga mereka hanya mengandalkan infrastruktur-infrastruktur lama yang ada di dalam desa sebagai media pendukung dalam proses pemberdayaan kelompok tani, Pemerintah kurang peduli akan kesejahteraan petani di Desa Sondong Layuk, hal ini dilihat dari tidak adanya tindakan pemerintah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada didesa. Tidak adanya tindakan pemerintah ketika kelompok-kelompok tani berhenti beroperasi, dan Respon yang tidak baik nampak dari masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat sangat menyayangkan potensi-potensi yang diabaikan oleh pemerintah sehingga berimbang pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan atau program dari pemerintah dikarenakan sikap yang terlalu cuek dengan keberadaan kelompok tani oleh pemerintah.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Sektor Pertanian

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas Desentralisasi pada hakikatnya merupakan pemberian kewenangan, yang sebelumnya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Negara memerlukan manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan warga Negara Indonesia sekaligus tujuan Negara dicantum dalam pembukaan undang-

undang dasar 1945 dalam alenia keempat dinyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara kesatuan Republic Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan Sosial.

KERANGKA TEORETIK

Pengertian Stategi

Hunger dan Weelen (2003), menjelaskan bahwa strategi merupakan serangkaian keputusan serta tindakan manajerial yang dapat menjadi penentu kinerja dalam sebuah organisasi untuk waktu yang lama. Dimana dalam tindakan tersebut mengandung pengamatan terhadap lingkungan, perumusan terhadap strategi yang akan dijalankan, implementasi strategi, evaluasi serta melakukan pengendalian. Sedangkan menurut Homel dan Prahalad dalam Winardi (2003), strategi adalah tindakan yang sifatnya incremental (senantiasa mengalami peningkatan) dan berlangsung secara terus menerus dan dilakukan atas pandangan yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan. Menurut Andrew (2005), strategi adalah pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan sadaran, maksud atau tujuan dan menghasilkan suatu kebijakan serta merencanakan untuk pencapaian tujuan serta memperinci apa yang ingin dicapai. Strategi merupakan suatu proses yang dalam banyak hal tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan dimana ditempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, dari proses tersebut kita dapat memisahkan dua aspek penting yang saling berhubungan erat dalam kehidupan nyata, tetapi dapat dipisah untuk tujuan analisis. Yang pertama adalah perumusan (formulasi) dan yang kedua adalah pelaksanaan (implementasi).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengertian strategi, penulis menyimpulkan bahwa strategi merupakan seluruh tindakan (dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan), yang dilaksanakan atau dijalankan agar kegiatan yang dilakukan mencapai target atau tujuan. Strategi berisi gambaran dari berbagai pelaksanaan kegiatan dan keputusan yang diambil dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Strategi dapat juga dikatakan sebagai perwujudan dari sebuah perumusan visi dan misi masing-masing lembaga atau organisasi.

Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan, desa yang di pimpin oleh seorang kepala desa. Desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah Desa menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah “kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan”

Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan Kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri.

Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah negara. Hal ini dikarenakan apabila kita menengok kebelakang, desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri. Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting.

Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan didalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diatas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada didalamnya. Pernyataan diatas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan bernegara yang menuju kearah munculnya negara modern, memunculkan fenomena yang cukup memprihatinkan yaitu adanya penurunan kemandirian dan kemampuan masyarakat desa.

Adanya situasi yang seperti ini merupakan cermin dari pemerintahan terdahulu yaitu pencerminan pemerintah orde baru yang menggunakan sentralisasi, birokratisasi dan adanya penyeragaman pemerintah desa, tanpa ada perhatian dan terkesan tak menghiraukan adanya kemajemukan masyarakat adat dan pemerintah asli desa. Hal tersebut dapat dapat terbukti dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang bersifat adanya penyeragaman desa secara nasional. Imbas dari semangat Undang-Undang tersebut dapat dilihat dari hampir semua kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang berkaitan dengan desa bersifat sentralistik dan penyeragaman desa. Sehingga mengakibatkan terus berkurangnya kemandirian dan kemampuan masyarakat desa.

Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayaan berakar dari kata daya, bermakna: (1) kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak; (2) kekuatan, tenaga (yang menyebabkan sesuatu bergerak dan sebagainya); (3) muslihat, empat, akal, ikhtiar, upaya. Kesejahteraan itu sendiri bermakna proses, cara, perbuatan memberdayakan. Menurut Shardlow Kesejahteraan adalah bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Kesejahteraan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya. (Nanah Machendrawati, dkk., 2001: 43)

Kesejahteraan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Kesejahteraan hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Carlzon dan Macauley sebagaimana dikutip oleh Wasistiono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Kesejahteraan adalah sebagai berikut: "membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tidaknya. (Rosmedi, 2006).

Kondisi Sejahtera biasanya menunjuk pada istilah Kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya semua kebutuhan material dan non-material. Dalam membahas Kesejahteraan, tentu harus diketahui dahulu tentang pengertian Kesejahteraan itu sendiri. Sejahtera adalah aman sentosa dan makmur. Sehingga Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran.

Poerwadaritma W.J.S (1996:121) dalam arti sempit, kata social menyangkut sektor Kesejahteraan social sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau Kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan. Yaitu hal yang menyangkut program-program atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah social seperti, kemiskinan ketelantaran, ketidak berfungsi fisik dan psikis, tuna social, tuna susila dan kenakalan remaja.

Ada tiga kategori pencapaian tentang Kesejahteraan. Pertama sejauh mana masalah sosial itu dapat diatur kedua, sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi dan ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diperoleh semua ini bias diciptakan dalam kehidupan bersama, baik ditingkat keluarga, komunitas maupun masyarakat secara luas.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy J.Moloeng, 2004:6).

DISKUSI

Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dibahas tentang analisa data, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara kepada informan. Menganalisa data merupakan suatu upaya untuk menata dan mengelompokkan data menjadi suatu bagian-bagian tertentu menurut kelompok data jawaban informan. Analisa data yang dimaksud adalah suatu interpretasi langsung berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan dengan tetap berpedoman kepada masalah dan tujuan penelitian. Pengkajian kualitatif dalam menyelidiki aktivitas kepala desa yang dalam hal ini pemerintah desa merupakan landasan dasar memahami sejauh mana strategi pemerintah desa dalam upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sondong Layuk.

Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dari Sektor Pertanian

Di Dinas Sosial Kabupaten Polewali mandar sendiri kedisiplinan pegawai dapat dilihat dari ke Data yang dikumpulkan berdasarkan penelitian melalui interview dengan beberapa informan, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah desa terkesan tidak memiliki strategi dalam mendorong pemberdayaan kelompok tani di Desa Sondong Layuk. Sebagaimana seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan dengan inisial VR, umur 40 Tahun, pekerjaan pengurus kelompok tani, pendidikan SMA : "Pemerintah desa terkesan tidak memiliki strategi dalam mensejahterakan

masyarakat khususnya di sektor pertanian atau bisa di katakan kurang peduli terhadap kelompok tani yang ada di desa Sondong Layuk “.

Pada saat penulis mencoba lebih jauh lagi mencari tahu terkait dengan minimnya kepedulian pemerintah desa dalam mendorong pengembangan dan pemberdayaan kelompok tani, Kepala Desa Sondong Layuk HS, umur 45 tahun, mengatakan:“Kami memang tidak secara umum dan menyeluruh melakukan pemberdayaan bagi kelompok tani, tapi sejauh ini kami sudah berusaha melakukan yang terbaik. Tapi kami juga terbatas dalam soal anggaran untuk bagaimana melakukan pemberdayaan kelompok tani baik itu pelatihan, pendampingan bahkan penyediaan fasilitas dan alat-alat pertanian lainnya. Namun perlu diketahui untuk penyediaan fasilitas pertanian sudah ada yang kami berikan, antara lain 1 (satu) unit alat traktor dan tidak hanya itu kami juga sudah memberikan bantuan seperti pupuk dan obat pembasmi hama. Tapi lagi-lagi perlu disadari bahwa untuk mengembangkan usaha-usaha pertanian tidak cukup hanya dilakukan oleh kami selaku pemerintah desa melainkan perlu ada kerjasama dari berbagai pihak bahkan selebihnya dari Instansi terkait, (Dinas pertanian) dan seluruh stockholder pemerintah terlebih khusus kerja sama dari masyarakat tentunya,karena terkadang kami mengalami kendala yang disebabkan kurangnya kerjasama dari masyarakat.” Kondisi yang memperlihatkan bahwa tidak adanya suatu program atau kebijakan dalam mengantisipasi diamnya kegiatan ekonomi di tengah pandemi di kecamatan tersebut, menjadi salah satu hal yang begitu memprihatikan bagi kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat Desa Sondong Layuk.

Pemerintah Desa dalam Membina Hubungan dengan Kelompok Tani

Dalam konteks pemberdayaan sosial kerap dan banyak kali selalu saja menyentuh berbagai dimensi aspek kehidupan dan salah satu faktor penting dalam pola pengembangan pemberdayaan sosial adalah bagaimana membangun pola hubungan yang holistic dan humanis, serta relevan dalam konteks peningkatan produktivitas. Pola hubungan yang dimaksudkan pada bagian ini adalah dimensi dan pola komunikasi yang terbangun antara pemerintah dan kelompok tani dalam rangka memberikan informasi yang bersifat edukatif dan transformatif untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat tani. Setelah melakukan penelitian dan penelaa melalui beberapa informan dan berbagai referensi melalui penelusuran kondisi dilapangan, menunjukan bahwa pola hubungan komunikasi antar pemerintah desa dan kelompok tani kurang terbangun. Hal ini kemudian diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh salah satu Informan dengan inisial :L.S, umur 47 Tahun, pekerjaan petani

Pendidikan SMA : “ Selama ini kami melihat bahwa pemerintah desa kurang begitu perhatian dan jarang melibatkan kami dalam memberikan pendapat untuk kelangsungan kelompok tani, apalagi dalam hal memberikan informasi,atau sosialisasi yang ada hubungan dengan pertanian.Selama ini kami hanya berusaha sendiri untuk bisa mengembangkan usaha-usaha kami ”.

Strategi Pemerintah Desa dalam Upaya Mensejaterakan Kelompok Tani.

Esensi dari sebuah pencapaian penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan faktor utama untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintahan. Dalam konteks strategi pemerintah dalam memberdayakan kelompok tani masalah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah soal kesejahteraan.

Pada bagian ini akan diuraikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan yang dianggap mampu dan cakap untuk memberikan informasi ilmiah terkait dengan strategi pemerintah dalam upaya mensejahterakan masarakat dari sektor pertanian, sebagaimana

yang diungkapkan oleh salah satu informan dengan inisial T.G Umur 32 tahun, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, menturkan bahwa : “Perhatian pemerintah dalam upaya mensejahterakan kelompok tani masih belum dirasakan. Dan saya kira pemerintah tidak memiliki strategi untuk mendorong kesejahteraan kami sebagai petani, hal ini bisa dilihat bahwa pemerintah kurang melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha pertanian, bahkan pemerintah juga kurang melakukan lobby untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah melalui dinas terkait. Jadi sejauh ini kami melihat bahwa pemerintah desa perlu ada perhatian khusus bagi kelompok tani. Karena kalau ini hanya dibiarkan akan berdampak bagi kesejahteraan kelompok tani dan tentunya sangat merugikan“.

Pembahasan

Pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, hubungan kerja / jaringan kerja, dan keadilan sosial. Karena hal ini merupakan, persyaratan yang memungkinkan setiap orang dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar bagi pelaksanaan existensi sebuah kelompok dan komunitas. Berangkat dari paradigma inilah kemudian pemberdayaan itu menjadi aspek dan ikon penting dalam mendorong kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan kelompok tani maka sedikitnya ada tiga langkah untuk menciptakan iklim dan suasana pemberdayaan kelompok tani yaitu: Upaya itu harus terarah (targetted). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus dibina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan. Selanjutnya pada bagian ini penulis mencoba menganalisis hasil penelitian dengan menyesuaikan kondisi objektif dilapangan dengan menggunakan pendekatan teori Strategi pemberdayaan yang dikemukakan oleh (Sunyoto Usman) :

1. Menciptakan Iklim

Setelah mencermati kondisi objektif dilapangan dan menyesuaikan dengan teori yang diuraikan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa Sondong Layuk tidak memiliki strategi dalam upaya memberdayakan kelompok tani sehingga kemudian kondisi iklim dan suasana dinamika kelompok tani belum mencerminkan hasil yang produktif demi kesejateraan mereka. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh informan dengan inisial : J.K, Umur 47 Tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SMA : Mengatakan bahwa :“ Pemerintah kurang memiliki perhatian dibidang pertanian, hal ini bisa dilihat dari perilaku pemerintah yang tidak pernah mengusahakan untuk memberikan pengertian dan motivasi serta menciptakan suasana pertanian yang mengairakan bagi petani untuk mendorong hasil pertanian supaya dikemudian hari bisa lebih produktif.”

2. Memperkuat Daya

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan juga proses pengintegrasianya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya.

Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. Sebagaimana apa yang diungkapkan N.M umur 35 tahun, pekerjaan petani, pendidikan SMA : “Tidak ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan daya atau potensi kelompok tani, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Mestinya pemerintah harus megupayakan akses untuk kelompok tani melalui sosialisasi, pemberian bantuan modal, obat-obatan pemberantas hama, pembuatan irigasi untuk mengairi sawah, dorongan pengaktifan lembaga kelompok tani didesa, bahkan bantuan-bantuan lainnya seperti pengadaan alat pengolah ”.

3. Melindungi

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karenakurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Pemihakan yang dimaksud adalah segala upaya yang dilakukan harus terarah atau tepat ditujukan kepada yang memerlukan. Melindungi harusdilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukandiri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Penulis mewawancara seorang pengurus kelompok tani Citawaya dan beliau mengatakan: “seharusnya pemerintah desa sebagai pelindung bagi kelompok-kelompok tani yang ada melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai pemerintah, tidak membiarkan kelompok-kelompok tani yang sudah ada berakhir tidak jelas”. Esensi dari sebuah pencapaian penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mencapai kesejateraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan faktor utama untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintahan. Dalam konteks strategi pemerintah dalam memberdayakan kelompok tani masalah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah soal kesejateraan.

Pada bagian ini akan diuraikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan yang dianggap mampu dan cakap untuk memberikan informasi ilmiah terkait dengan strategi pemerintah dalam upaya mensejahterakan masarakat dari sektor pertanian, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu informan dengan inisial T.G Umur 32 tahun, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, menturkan bahwa : “Perhatian pemerintah dalam upaya mensejahterakan kelompok tani masih belum dirasakan. Dan saya kira pemerintah tidak memiliki stretegi untuk mendorong kesejahteraan kami sebagai petani, hal ini bisa dilihat bahwa pemerintah kurang melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha pertanian, bahkan pemerintah juga kurang melakukan lobby untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah melalui dinas terkait. Jadi sejauh ini kami melihat bahwa pemerintah desa perlu ada perhatian khusus bagi kelompok tani. Karena kalau ini hanya dibiarkan akan berdampak bagi kesejahteraan kelompok tani dan tentunya sangat merugikan“.

KESIMPULAN

Setelah mengadakan penelitian akhirnya penulis sampai pada kesimpulan yang mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini.

1. Pemerintah Desa Sondong Layuk dalam hal ini tidak memiliki strategi untuk meengsejahterakan Masyarakat Dari Sektor Pertanian Di Desa Sondong Layuk, pemerintah hanya membiarkan

kelompok-kelompok tani berjalan sendiri tanpa adanya pendampingan, perlindungan, serta kekuatan untuk kelompok tani maju berkembang dalam teknologi pertanian sehingga mereka hanya mengandalkan infrastruktur-infrastruktur lama yang ada di dalam desa sebagai media pendukung dalam proses pemberdayaan kelompok tani.

2. Pemerintah kurang peduli akan kesejahteraan petani di Desa Sondong Layuk, hal ini dilihat dari tidak adanya tindakan pemerintah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada didesa. Tidak adanya tindakan pemerintah ketika kelompok-kelompok tani berhenti beroperasi.
3. Respon yang tidak baik nampak dari masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat sangat menyayangkan potensi-potensi yang diabaikan oleh pemerintah sehingga berimbang pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan atau program dari pemerintah dikarenakan sikap yang terlalu cuek dengan keberadaan kelompok tani oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat (1990) Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta, Gramedia.
- Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Artikel Michail Porter berjudul “What is Strategi?” yang dimuat dalam Business Review November-Desember 1996.
- Moleong, J. Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- J. Nasikun, 1995, Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda, dalam Jefta Leibo, Sosiologi Pedesaan, Yogyakarta : Andi Offset.
- \Suharto, Edi. 2006,Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.Bandung, Refika Aditama.
- Usman,2004, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif. Bandung: Alfabeta, 1998, cetakan kelima.
- Ife, J.W, 1995. Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice. Melbourne : Longman.
- Pranarka dan Moeljarto, Mangatas. 1996,Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah.
- Juliantara, 2005, Pembaruan Desa Bertumpuh Pada Yang Terbawah. Jakarta, Gunung agung.
- Kutut suwondo, 2005, Civil Society Di Aras Lokal: Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara Di Pedesaan Jawa, Yogyakarta : Pustaka Belajar & Percik.
- Kedi Suradisastra. 2006. Revitalisasi Kelembagaan Untuk Percepatan Pembangunan Sektor Pertanian dalam Otonomi Daerah. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Bogor. Jurnal Analisa Kebijakan Pertanian. Volume 4 No 4 Desember 2006.
- Wurangian, M. (2018). Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Jurnal politik, 7(2), 1-12
- Langi, .J. E. (2015). Sterategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di desa popontolen kecamatan tumpaan kabupaten minahasa selatan (studi kasus di desa popontolen kecamatan tumpaan kabupaten minahasa selatan) 1. Politico: jurnal ilmu politik, 2(6), 1083.